TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF OBLIGATION OF CONDUCT

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi: Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

AL MAIDAH PUTRI

NPM: 2174201001530

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM 2025

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF OBLIGATION OF CONDUCT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S - 1

Program Sarjana

Program Studi: Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

AL MAIDAH PUTRI

NPM: 2174201001530

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujul

Tanggal : 31 Mei 2025



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF OBLIGATION OF CONDUCT

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AL MAIDAH PUTRI

NPM. 2174201001530

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 14 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Anggota Dewan Penguji

Wiwin Ariesta., SH.,MH.

Dwi Budiarti, SH.,MHum

Sekretaris Dewan Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, SH.MH

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Uptak memperoleh gelar sarjana

Augga 14 Juni 2025 Pakuras Hukum

terlieka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum

ABSTRAK

Keterwakilan Perempuan merupakan partisipasi perempuan dalam sebuah proses politik, pemerintahan, dan pengambilan suatu keputusan, sehingga perempuan dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat menurut Pasal 8 Huruf (C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga keterwakilan politik perempuan dalam proses politik dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterwakilan perempuan terhadap kebijakan publik dan pengambilan keputusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif *Obligation Of Conduct* berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, penulis menggunakan teori obyektif yaitu berupa penekanan pada tindakan nyata dan hasil yang dapat diukur, serta kewajiban negara untuk memenuhi standar tertentu dalam melaksanakan hakhak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik terjamin melalui pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tentang hak-hak perempuan dalam proses politik dan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Perlindungan hukum dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kuota perempuan, pengawasan pemilihan, dan pencegahan diskriminasi, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Kata kunci : Tanggung Jawab Negara, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Umum dan *Obligation Of Conduct*

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa :

- Di dalam naskah skripsi ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
- Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
- Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproes sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 26 April 2025

Penulis.

AL MAIDAH PUTRI

NPM, 2174201001530

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk dan karunia-Nya yang tanpa batas kepada penulis. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada beliau serta keluarga, sahabat dan umatnya.

Alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT, penulis senantiasa memberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF OBLIGATION OF CONDUCT" yang merupakan salah satu syarat penyusunan penulisan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Bapak Yudhia Ismail, S.H.M.Hum.
- 3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi ini.

- 4. Ibu Dwi Budiarti, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
- 5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H.MH selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H. MHum selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun untuk penulisan penulisan skripsi ini.
- 7. Segenap dosen dan staf akademik yang telah memberikan fasilitas, ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 8. Teruntuk Cinta Pertama Papa Muhammad Syaifuddin, S.H. dan Surga Dunia ku Mama Fitriyah yang telah memberikan dukungan tanpa henti selama proses pendidikan, telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah saya, memberi saya semangat untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Segala pengorbanan yang telah Papa Mama berikan baik dalam bentuk materi, perhatian, maupun waktu, sangat berarti bagi saya. Serta adekku yang selama ini telah membantu dalam bentuk perhatian, semangat serta doa yang tiada henti hentinya demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak saran dan diskusi-diskusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan akan kami terima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.



DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAI	K	i
PERNYA	TAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PE	ENGANTAR	iii
DAFTAR	ISI	vi
DAFTAR	LAMPIRAN	ix
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum <mark>Tentang</mark> Tanggung Jawab Ne <mark>gara</mark>	13
	1. Pengertian Tanggung Jawab Negara	13
	2. Jenis-jenis Tanggung Jawab Negara	14
	3. Prinsip dan Konsep Tanggung Jawab Negara	16
	4. Teori Tanggung Jawab Negara	19
	B. T <mark>injauan Umum Tentang Keterwakilan Pere</mark> mpuan	23
	1. Pengertian Keterwakilan Politik Perempuan dan	Hak –
	Hak Politik Perempuan	23
	2. Pentingnya Keterwakilan Politik Perempuan	26
	3. Kuota Keterwakilan Politik Perempuan dalam	
	Pemilihan Umum	27
	4. Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan	29

	C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	30
	1. Pengertian dan Asas – Asas di dalam Pemilihan Umum	30
	2. Teori – Teori Pemilihan Umum	31
	3. Sistem Pemilihan Umum	33
	4. Aturan Hukum Mengenai Batas Minimal 30%	36
	D. Tinjauan Umum Tentang Obligation Of Conduct	39
	1. Pengertian Obligation Of Conduct	39
	2. Konsep Dasar Obligation Of Conduct	41
	3. Prinsip dalam Obligation Of Conduct	43
	4. Tanggung Jawab Negara dalam Obligation Of	
	Conduct	44
BAB III :	: METODE PENEL <mark>ITIA</mark> N	
	A. Perspektif Pendekatan Penulisan	47
	B. Ruang Lingkup Penelit <mark>ian</mark>	48
	C. Jenis dan Sumber Data	49
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV :	: TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK	
	TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN	
	DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF	
	OBLIGATION OF CONDUCT	

	Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Keterwakilan
	Perempuan dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif
	Obligation Of Conduct55
	2. Perlindungan Hukum Bagi Keterwakilan Perempuan
	dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Teori Konstitusi
BAB V :	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran91
DAFTAR PU	A. Kesimpulan
LAMPIRAN	PASURUAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Kartu Konsultasi

